

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH SOREANG)

LINA NURLINA¹, DIDIN MUHAFFIDIN², DEDI SUKARNO³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

³dedi.sukarno@unpad.ac.id

ABSTRACT

This study, entitled "Implementation of Waste Management Policy in Bandung Regency (Case Study in the Soreang's Waste Service Area)". The author uses the theory of policy implementation proposed by Budiman Rusli, which consists of policy content, policy implementers and target groups and policy environment. The research method is a qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of waste management policies in the Soreang's Waste Service Area of Bandung Regency has not been successfully implemented. There is still a lack of communication with the policy target groups, capabilities, competencies and consistency of the implementers who are still lacking in carrying out their duties. And the target groups that are still traditional so that it is difficult to give an understanding of waste management, do not support the achievement of policy objectives. For the implementation of the policy to be successful, the Waste Management Sector must focus more on improving aspects such as communication, coaching in increasing public awareness in managing waste, coordinating with the Subdistrict or villages that have been accompanied by TPS / TPST in their use, and increasing the capability and consistency of the implementers and public support, from the target group and the business world.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Bandung Regency

WASTE MANAGEMENT POLICY IMPLEMENTATION IN BANDUNG DISTRICT (CASE STUDY IN THE SOREANG WASTE SERVICE AREA)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)". Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli, yang terdiri dari isi atau konten kebijakan, implementator kebijakan dan kelompok target serta lingkungan kebijakan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok target dan dunia usaha.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kabupaten Bandung

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu fenomena sosial yang sampai saat ini belum mampu diatasi secara tuntas oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kota maupun desa di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk banyak dengan pola konsumsi yang beragam, akibat dari tingginya aktivitas masyarakat itu sendiri dihadapkan pada masalah sampah ini. Jumlah penduduk dan pola

konsumsi seperti itu pada akhirnya berpotensi menimbulkan volume, jenis dan karakteristik sampah terus meningkat dan menjadi masalah karena belum diimbangi dengan pengelolaan persampahan yang baik.

Hal itu pula yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan jumlah Penduduk Kabupaten Bandung yang cukup padat yaitu mencapai sebanyak 3.470.393 jiwa dan rata-rata tingkat kepadatan

penduduk Kabupaten Bandung sebesar 2.005 jiwa per km² membuat tugas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola sampah menjadi semakin bertambah, dimana sampah yang ditanggung oleh Kabupaten Bandung dari hari ke hari menjadi semakin berat.

Berdasarkan data timbulan sampah dari Bidang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dari total luas wilayah Kabupaten Bandung yang mencapai 1.762,39 km², timbulan sampah di Kabupaten Bandung pada tahun 2014, setiap harinya diketahui mencapai 6.363m³/hari sedangkan kapasitas sampah yang dapat terangkut kendaraan hanya sebesar 1.100m³/hari.

Guna mengelola sampah, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bandung itu sendiri telah membuat suatu kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut adalah berupa peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung, dimana untuk penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 yang juga mengalami perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung.

Walaupun kebijakan mengenai pengelolaan sampah sudah lama dibuat, namun pada pelaksanaannya, sebagian besar pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan sesuai dengan aturan kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan masih banyak ditemukan tumpukan-tumpukan sampah di wilayah Kabupaten Bandung. Wilayah Pelayanan Sampah Soreang yang merupakan wilayah penghasil timbulan sampah kedua terbesar di Kabupaten Bandung dan memiliki jarak terdekat dengan pusat pemerintahan dihadapkan pada permasalahan yang sama.

Berdasarkan data kubikasi timbulan sampah Wilayah Pelayanan Sampah Soreang oleh Bidang Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung pada tahun 2016, menunjukkan bahwa sisa sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang jauh lebih tinggi dari sampah yang terangkut. Sekitar 89,83% sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang tidak terangkut yang artinya penumpukan sampah di wilayah tersebut benar-benar tinggi. Indikasi masalah yang ditemukan adalah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

masih kecil, masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah dibandingkan membantu mengurangi volume sampah. Pengelolaan TPS di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang yang telah dibangun dan menjadi tanggung jawab Dinas dalam pengelolaannya masih belum efektif. Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung hanya ditemukan beberapa TPS yang masih aktif. Salah satu tahapan pengelolaan sampah yaitu pengangkutan masih sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan pengangkutan dapat terjadi sampai 2-3 hari bahkan terkadang dilakukan pengangkutan setelah masyarakat melakukan pengajuan pelayanan pengangkutan. Masalah lainnya yaitu urgensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk benar-benar mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di daerahnya sesuai isi kebijakan, dikarenakan tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir sehingga memerlukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Utara dalam membuang residu sampah yang dihasilkan daerahnya, dimana dalam kegiatannya memakan waktu, biaya, dan jarak yang tidak sedikit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif relevan sebagai dasar metode dalam penelitian ini, karena fenomena yang terjadi tidak memungkinkan diukur secara tepat (kuantifikasi), sehingga guna mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan eksplorasi kepada informan. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk membantu menjawab identifikasi masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Bandung di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang. Melalui metode kualitatif penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam karena berperan sebagai instrumen kunci penelitian dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Penulis berperan langsung dalam mengumpulkan data, menganalisis dan menggambarkan secara langsung bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah benar-benar terjadi dengan menerjemahkan data-data yang ditemukan di lapangan. Sehingga akan lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun data

penelitian dan hasil penelitian yang didapat penulis diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Dan dalam menentukan informan dilakukan dengan teknik *purposive*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung (Studi di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang), melihat dari teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Budiman Rusli dimana terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi atau konten kebijakan, implementor atau pelaksana kebijakan dan kelompok target dan lingkungan kebijakan.

Dari isi atau konten kebijakan sudah jelas, penyimpangan yang terjadi lebih kepada proses pelaksanaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimuat dalam isi kebijakan. Salah satu bagian dari isi kebijakan tersebut adalah komunikasi kepada kelompok target. Komunikasi sejauh ini tidak mudah dilakukan apabila hanya dengan sosialisasi ataupun kaderisasi. Selain itu, sumber daya manusia masih kurang terutama pada bagian pelayanan pengangkutan, kurangnya anggaran dana juga berdampak pada ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah.

Terkait dengan sumberdaya, sumber daya manusia yang dimiliki pelaksana kebijakan yaitu Bidang Pengelolaan Sampah belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama dirasakan pada UPTD Pengangkutan Wilayah Soreang yang pada akhirnya harus menambah pekerja dari luar lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah sebagai pegawai harian lepas tanpa dibekali pengetahuan mengenai pengangkutan. Keadaan tersebut tentu berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kebijakan terutama bagian pelayanan pengangkutan. Sumber daya keuangan juga masih kurang memadai dan belum melihat kebutuhan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada akhirnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah seperti pengadaan tempat sampah, kendaraan pengangkutan sampah baik dari armada truk, gerobak

sampah sampai motor roda tiga pengangkutan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang belum memadai.

Dari implementor atau pelaksana, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kondisi eksisting TPS yang berada di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang yang kini sebagian besar tidak aktif sehingga timbulan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang tidak lantas berkurang. Belum adanya kompetensi yang diberlakukan bagi pelaksana juga mempengaruhi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut khususnya dirasakan oleh bagian pelayanan pengangkutan Wilayah Pelayanan Sampah Soreang. Komitmen pelaksana sudah cukup baik dilihat dari upaya yang dilakukan Bidang Pengelolaan Sampah di WPS Soreang dalam memfasilitasi sarana tempat sampah tematik. Dimana sampah tematik tersebut memiliki warna dan bentuk yang mencolok sehingga dapat menarik perhatian masyarakat akan adanya tempat sampah yang diharapkan dapat meminimalisir pembuangan sampah secara sembarangan atau timbulan sampah. Konsistensi pelaksana masih kurang dilihat dari masih terjadinya keterlambatan pengangkutan dan revitalisasi TPA Babakan yang akhirnya menyebabkan Kabupaten Bandung menggunakan TPA milik Pemerintah Kabupaten Bandung Utara. Hal ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan implementasi kebijakan karena keadaan tersebut berdampak pada waktu yang dipakai dalam kegiatan pengangkutan semakin panjang karena harus ditempuh lintas daerah, sehingga untuk meminimalisir adanya tumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan harus diupayakan pelaksanaan pengelolaan sampah yang benar sesuai aturan. Dari sisi kelompok target, sebagian besar masyarakat di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah. Tradisional disini mereka masih memandang bahwa sampah cukup dengan pola kumpul-buang-angkut dan membayar retribusi untuk pelayanan pengangkutan. Keadaan seperti ini yang pada akhirnya menjadi awal belum dapat terlaksananya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang.

Dari segi lingkungan kebijakan baik itu dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya dan dukungan publik belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Contoh dari sisi lingkungan kebijakan dari segi kondisi ekonomi

juga belum dapat menunjang karena sebagian besar masyarakat memandang pengelolaan sampah akan selesai dengan membayar besaran retribusi. Terdapat keterkaitan antara kondisi ekonomi dan sosial. Masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi lebih baik dalam pengelolaan sampah dikarenakan berupaya mengurangi jumlah atau besaran volume sampah sehingga dapat masuk ke dalam kategori atau klasifikasi kelas dengan tarif retribusi yang lebih kecil disamping apa jenis pelayanan pengangkutan yang digunakan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki ekonomi berkecukupan, yang mampu membayar retribusi termasuk apa jenis klasifikasinya beranggapan bahwa dengan pembayaran retribusi saja sudah cukup ikut andil dalam pengelolaan sampah. Dengan masih belum terpenuhinya beberapa faktor-faktor penting implementasi kebijakan tersebut, maka dapat dikatakan Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang belum berhasil dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang), penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung tepatnya di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang yang dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bersama masyarakat Kabupaten Bandung, dapat dikatakan belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Dikatakan belum berhasil, karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada yang belum memenuhi faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dari Budiman Rusli, yaitu :

1. Isi kebijakan atau konten, pada faktor ini yang mengalami kendala adalah pada komunikasi. Komunikasi yang dilaksanakan kepada kelompok sasaran yaitu Masyarakat Wilayah Pelayanan Sampah Soreang yang biasa disampaikan melalui bentuk sosialisasi ini memiliki frekuensi yang masih sangat jarang. Adapun sosialisasi yang dilaksanakan belum semua mengikut sertakan masyarakat, hanya kader-kader kecil yang mendapat tugas untuk

menyampaikan kembali apa yang dijelaskan dalam sosialisasi kepada masyarakat sekitar daerahnya. Namun, kaderisasi ini pun belum begitu jelas keberhasilannya karena tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait kaderisasi ini. Pada akhirnya komunikasi yang kurang ini mempengaruhi kualitas dan penyebaran informasi dan kejelasan dari isi kebijakan.

2. Implementor atau pelaksana kebijakan dan kelompok target. Pada faktor ini yang menjadi kendala adalah pada kapabilitas dan konsistensi implementator pada implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fakta dilapangan salah satunya kondisi eksisting TPS yang berada di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang sebagian besar kini tidak aktif. Konsistensi pelaksana juga masih kurang dapat dilihat dari masih terjadinya keterlambatan pengangkutan dan revitalisasi TPA Babakan yang belum sesuai dengan isi kebijakan, akhirnya menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tidak memiliki TPA sehingga menggunakan TPA milik Pemerintah Kabupaten Bandung Utara, dimana memakan jarak, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Kelompok target yaitu masyarakat di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang termasuk masyarakat yang masih tradisional jika terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah. Tradisional disini mereka masih memandang bahwa sampah cukup dengan pola kumpul-buang-angkut dan membayar retribusi untuk pelayanan pengangkutan. Keadaan seperti ini yang pada akhirnya menjadi awal belum dapat terlaksananya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang, dimana seharusnya sampah dilakukan pengolahan di sumber sampah salah satunya dengan cara 3R. Kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang mengenai pengelolaan sampah juga menjadi kendala untuk mewujudkan tujuan kebijakan yaitu menjadikan sampah sebagai sumberdaya.
3. Lingkungan kebijakan, pada faktor ini yang menjadi kendala adalah dukungan publik. Respon masyarakat dalam partisipasi aktif mengelola sampah ataupun mengikuti sosialisasi

masih sangat kurang. Selain itu juga dukungan publik ini masih kurang karena belum banyak menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Keadaan seperti itu berpengaruh pada pelaksanaan karena beban kerja pelaksana utama yaitu Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung akan lebih berat.

Dalam rangka perbaikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di masa yang akan datang, beberapa hal yang dapat penulis sarankan yaitu :

1. Mengadakan sosialisasi secara berkala pada setiap jenjang instansi dari Kabupaten ke Kecamatan, Kecamatan ke Desa, dan Desa ke masyarakat sekitar dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sampah dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Dibuatnya jadwal rutin maupun tindak lanjut dari bentuk-bentuk komunikasi yang telah dilaksanakan salah satunya kaderisasi.
2. Membentuk tim pengawas atau pendamping untuk mengawasi dan melakukan pembinaan di setiap fasilitas prasarana yang masih bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh pengawasan terhadap pemanfaatan TPS dan TPST yang telah dibangun. Termasuk memperbaiki koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan/Desa dalam mengoptimalkan TPS dan TPST bagi kecamatan yang sudah memiliki fasilitas tersebut.
3. Tersedianya SOP bagi pelaksana terutama *staf* pengangkutan, untuk meminimalisir masalah keterlambatan pengangkutan. Memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan kebijakan secara berkala untuk meningkatkan kapabilitas, komitmen dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
4. Memperluas dukungan publik dengan menjalin kerjasama yang lebih banyak dengan pihak luar maupun dunia usaha untuk membantu pelaksanaan kebijakan terkait bantuan dana, pembangunan fasilitas atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah terbaru.
5. Permasalahan yang terjadi dilapangan harus diselesaikan secara cepat dan tepat pada semua tingkatan instansi, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Dr. Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Creswell, John.W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Hill, Michael. (ed.). 1993. *The Policy Process: A Reader*. New York: Harvester Wheatsheaf
- Hill, Michael and Peter L. Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London : SAGE Publications
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Moleong, Lexy. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2015. *Public policy teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A., 2007. *Perilaku Organisasi Buku I*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung : Hakim Publishing
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta : PT.Buku Seru

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.21
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.15
Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung No.21 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Bandung No. 25 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung No.21 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Bandung No.55 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bandung No.25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung No.21 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung No.21 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Sampah

Laporan Akhir Dinas Lingkungan Hidup di
Bidang Pengelolaan Sampah Kabupaten
Bandung

Laporan Akhir Rencana Induk Persampahan Kabupaten
Bandung

Dwianti, Karina. 2013. Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi
Kasus pada Kawasan Taman Konservasi
Tegallega. Skripsi, Jatinangor : Program Strata
Satu

Rachmawati, Intan. 2015. Implementasi
Kebijakan Penanganan Sampah Oleh Dinas
Kebersihan Kota Bekasi. Skripsi, Jatinangor :
Program Strata Satu